

KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR DAN WAWANCARA

Riri Ardianti¹, Memi², Agus Lestari³

Administrasi Pendidikan, Universitas Jambi, Jambi

E-mail: [*ririardianti2902@gmail.com](mailto:ririardianti2902@gmail.com)¹, memi1112a.d@gmail.com², aguslestari@unja.ac.id³

ABSTRAK

Ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang menghambat pemerataan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor utama penyebab ketimpangan pendidikan serta menganalisis kondisi nyata di lapangan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dan wawancara dengan guru, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan disebabkan oleh akses yang tidak merata terhadap infrastruktur pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat, serta distribusi dan kualitas guru yang belum optimal. Hasil menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, implementasinya di berbagai daerah masih belum efektif. Kesimpulannya, diperlukan kebijakan pendidikan yang konsisten, berbasis kebutuhan lokal, dengan pengawasan dan transparansi yang kuat agar seluruh anak di Indonesia, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses pendidikan yang adil dan berkualitas.

Kata kunci

Ketimpangan Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Infrastruktur Pendidikan

ABSTRACT

Educational inequality in Indonesia remains a serious issue that hinders the equitable development of human resources. This study aims to identify the main factors contributing to educational disparities and to analyze the real conditions in the field. Using a descriptive qualitative method through literature review and interviews with teachers, the research finds that inequality is caused by unequal access to educational infrastructure, family economic conditions, low public awareness, and the uneven distribution and quality of teachers. The results indicate that, despite the implementation of various policies, their application in different regions is still ineffective. In conclusion, consistent education policies based on local needs, along with strong oversight and transparency, are needed to ensure that all children in Indonesia—including those in remote areas—can access fair and quality education.

Keywords

Educational Inequality, Education Policy, Education Infrastructure

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar yang menjadi dasar dalam pembangunan suatu bangsa. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana yang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat ukur dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memiliki peran yang strategis sebagai fondasi dalam terciptanya kesetaraan dalam kesempatan, perubahan status sosial, dan peningkatan daya saing ditengah arus globalisasi. Kurniawati (2022) menyatakan bahwa hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA (*Programme For International Student Assessment*) pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi yang rendah yakni k1-74 dari 79 negara lainnya, yang menandakan Indonesia berada di posisi ke-6 terendah. Oleh karena itu, pemerataan

pendidikan menjadi komponen kunci dalam upaya mencapai keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang disahkan pada tanggal 8 juli 2003, disebutkan dalam BAB IV pasal 5 No 3 bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan masih jauh dari yang diharapkan. Kesenjangan sosial, maupun antar jenis kelamin dan kelompok etnis masih terjadi, hal ini menjadi tantangan besar yang dapat memperlambat pembangunan sumber daya manusia yang menyeluruh dan berkeadilan. Nurhada (dalam Satria, dkk, 2025) mengidentifikasi bahwa permasalahan pemerataan di indonesia karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dilihat dari Data yang diperoleh di Portal data pendidikan (2024), pada tahun ajaran 2023/2024 menurut tingkat provinsi jumlah siswa yang putus sekolah mencapai 37.856 siswa. Dalam Radio Republik Indonesia (2024) dapat dilihat bahwa hasil wawancara yang dilakukan oleh sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto dalam menanggapi jumlah siswa yang putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024, mengatakan bahwa tingginya angka putus sekolah karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga yang memaksa siswa berhenti untuk membantu perekonomian. Faktor sosial juga ikut dalam permasalahan ini, pendidikan belum menjadi prioritas karena adanya tuntutan bekerja membantu keluarga atau mengikuti tradisi tertentu, seperti pernikahan dini, terutama bagi anak perempuan dalam beberapa komunitas. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menanggapi pentingnya pendidikan jangka panjang yang membuat anak-anak terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Disamping itu, perbedaan dalam hal akses terhadap fasilitas sekolah, kesediaan tenaga pendidik berkualitas, dan mutu pengajaran menjadi bukti nyata bahwa sistem pendidikan di indonesia belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki akses terhadap sekolah yang lebih baik, fasilitas belajar yang memadai, serta guru yang berkualitas, sebaliknya, anak-anak yang berada di wilayah terpencil sering kali harus menempuh jarak jauh, belajar di ruang yang rusak, dan menghadapi keterbatasan dalam sarana dan prasarana pendidikan.

Permasalahan ketimpangan pendidikan juga diperparah oleh kebijakan publik atau langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengelola sistem pendidikan yang sampai saat ini belum optimal. Meskipun berbagai program telah dibuat oleh pemerintah, seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), KIP (Kartu Indonesia Pintar), kebijakan zonasi, implementasinya diberbagai daerah sering kali tidak merata dan kurang efektif. Kurangnya konsisten dalam arah kebijakan yang diakibatkan pada perhentian kepemimpinan yang membawa visi dan misi program berbeda-beda membuat sekolah, guru, siswa harus terus beradaptasi dalam perubahan sistem yang tidak selalu dibutuhkan di lapangan. Serta maraknya korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi menjadi ancaman yang membuat pendidikan ini tidak merata, seperti yang terjadi di jambi (dalam detiksumbagsel, 2025) yang menyebabkan kerugian negara mencapai 21,89 miliar. Hal

ini terjadi karena tidak adanya transparansi, pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana, serta lemahnya penegak hukum dalam menangani berbagai kasus.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan ketimpangan pendidikan di Indonesia dan menganalisis kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Rencana pemecahan masalah yang diajukan meliputi evaluasi kebijakan pendidikan yang sudah berjalan, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta perumusan strategi yang berbasis kebutuhan lokal untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggali secara mendalam faktor-faktor penyebab ketimpangan pendidikan di Indonesia. Data dikumpulkan dengan menggunakan dua metode, yaitu kajian literatur dan wawancara. Kajian literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan dari instansi pemerintah yang relevan dengan topik ketimpangan pendidikan. Sementara itu wawancara yang dilakukan kepada salah satu guru di sekolah Diniyyah Al-Azhar di Provinsi Jambi, untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai tantangan nyata yang dihadapi dalam pemerataan pendidikan.

Data dari hasil wawancara di transkripsi dan dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk menemukan pola-pola penyebab ketimpangan serta upaya-upaya yang telah atau dapat dilakukan. Dengan menggabungkan informasi dari literatur akademik dan pengalaman praktis di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan aplikatif dalam merumuskan solusi yang lebih efektif terhadap permasalahan ketimpangan pendidikan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu penyebab utama ketidakmerataan pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan infrastruktur pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ayumningtyas (2021) mengatakan bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang tidak merata diantara wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan masih adanya ketimpangan terhadap akses pendidikan. Kurniawati (2022) menjelaskan bahwa masalah pendidikan di Indonesia dalam lingkup mikro salah satunya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Huraيرا, dkk (2024) juga menekankan bahwa tantangan dalam menghadapi ketimpangan pendidikan, karena kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah yang kurang terlayani. Sampai saat ini banyak sekolah di daerah tertentu yang dapat dijumpai yang kekurangan akan fasilitas bahkan ada yang tidak memiliki fasilitas sama sekali. Masalah ini disebabkan oleh banyak faktor seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh. Akibatnya banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas disekolah dengan baik.

Dari sisi ekonomi, ketimpangan pendidikan semakin menjadi karena kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Yang & Qiu (dalam Wardhana, dkk, 2023) menyatakan

bahwa keluarga miskin tidak memiliki peluang yang besar dalam memperoleh pendidikan. Penduduk perkotaan juga cenderung memiliki pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan pedesaan sehingga masyarakat di perkotaan sanggup membiayai pendidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Ayuningtyas (2021) mengatakan bahwa kesempatan akses pendidikan belum merata dengan baik antara pedesaan dan perkotaan, sehingga pendidikan di perdesaan belum dapat dinikmati secara merata. Hal ini diakibatkan karena jumlah anggota rumah tangga dalam keluarga dan kondisi ekonomi keluarga, serta faktor lain seperti status bekerja dan jenis kelamin kepala rumah tangga, serta jenis kelamin anak.

Dari data Dapodik pada tahun ajaran 2024/2025 jumlah guru di Indonesia mencapai 3.443.161 orang, namun ketimpangan dalam distribusi guru masih menjadi menjadi masalah yang signifikan. Nanggala (2020) mengatakan bahwa untuk mengatasi pemerataan pendidikan harus meliputi dua aspek, salah satunya keadilan dalam ketersediaan sarana dan prasarana serta guru profesional di setiap sekolah di Indonesia, maka sistem zonasi mengakomodir tujuan tersebut. Akan tetapi, realita pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia masih perlu ditangani secara cermat, khususnya dalam memperbaiki kebijakan tersebut, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat. Rahmanti (2022) menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini perlu melakukan analisis dan evaluasi komprehensif terhadap penyebaran guru dengan melihat kondisi jumlah guru berdasarkan peta kecukupan di daerah, mengatur pola distribusi berdasarkan skema wilayah penyebaran guru di daerah, serta pemindahan mutasi guru PNS perlu ditekan untuk mengurangi kesenjangan angka kecukupan guru PNS di daerah.

Dalam menangani ketimpangan pendidikan tidak hanya dilihat dari penempatan guru, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas yang dimiliki oleh guru. Isma, dkk (2023) menyatakan bahwa kurangnya jumlah guru yang berkualitas dan terampil, serta keterbatasan insentif dan dukungan bagi mereka, akan menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Idin, dkk (2024) ketidakmerataan kualitas guru menyebabkan ketimpangan dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan di antara siswa. Siswa yang mendapatkan kualitas pendidikan dari guru yang berkualitas akan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan prestasi yang baik, sedangkan siswa dibawah bimbingan guru dengan kualitas rendah cenderung mengalami kesulitan belajar. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang tepat untuk memberikan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas untuk semua siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Banunu (2021) akan ketimpangan pendidikan di NTT menjelaskan bahwa pendidikan yang terjadi di daerah kaya/perkotaan, pada awalnya juga tidak merata, akan tetapi lama-lama menjadi lebih merata karena banyak masyarakat yang mulai bersekolah. Akan tetapi hal ini tidak dapat ditetapkan oleh banyak daerah, terutama di daerah terpencil/perdesaan, ketimpangan pendidikan terus terjadi karena akses dan fasilitas pendidikan yang masih kurang. Selain itu Handayani & Sukari (2025) menyatakan bahwa biaya pendidikan yang cenderung tinggi menjadi beban bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi tiap daerah agar setiap anak dapat mengakses pendidikan dengan lebih mudah.

4. KESIMPULAN

Ketimpangan pendidikan di Indonesia merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakseimbangan infrastruktur pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, hingga distribusi dan kualitas guru yang belum merata. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang konsisten, berbasis kebutuhan lokal, serta dilengkapi dengan pengawasan dan transparansi yang kuat agar seluruh anak bangsa, khususnya di daerah terpencil, dapat memperoleh pendidikan yang adil dan berkualitas. Namun, artikel ini memiliki keterbatasan karena sebagian besar sumber data berasal dari literatur sekunder dan hanya mewawancarai satu orang guru sebagai narasumber utama. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas jumlah responden, terutama dengan melibatkan lebih banyak guru dari berbagai daerah, serta memperkaya sumber data dari berbagai perspektif agar hasil penelitian menjadi lebih representatif dan mendalam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, I., 2021. *Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6(2), pp.117–129. Available at: <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>
- Banunu, N., 2021. *Ketimpangan Pendidikan di Nusa Tenggara Timur: Evaluasi Kurva Kuznet dan Determinannya*. Jurnal Statistika Terapan, 1(1), pp.1–20. Available at: <https://doi.org/10.5300/jstar.v1i1.9>
- Dimas, S., 2025. *Polisi bidik 3 tersangka lagi kasus korupsi Disdik Jambi, siapa saja*. [online] Detik Sumbagsel. Available at: <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7864997/polisi-bidik-3-tersangka-lagi-kasus-korupsi-disdik-jambi-siapa-saja/amp> [Accessed 7 May 2025].
- Handayani, Y. and Sukari, S., 2025. *Problematisasi Sistem Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS), 3(1), pp.168–179. Available at: <https://doi.org/10.54066/jupendis.v3i1.2851>
- Humaira, C.P., Ramadhani, I., Nurshasanah, I., Aziz, A.R., Achamd, S. and Supriyono, 2024. *Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah: Tantangan dan solusi dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi*. Jurnal Pendidikan Tambusai, pp.1–7.
- Idin, A., Nurlaela, N. and Marwan, I., 2024. *Disparitas Kualitas Guru dalam Pendidikan*. Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(3), pp.193–201.
- Indonesia, Presiden Republik, 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Isma, A., 2023. *Peta Permasalahan Pendidikan Abad 21 di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Terapan, pp.11–28.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), 2025. *Jumlah siswa putus sekolah menurut tingkat tiap provinsi*. [online] Portal Data Pendidikan. Available at: <https://data.dikdasmen.go.id/dataset/p/peserta-didik/jumlah-siswa-putus->

- [sekolah-menurut-tingkat-tiap-provinsi-indonesia-sd-2023](#) [Accessed 7 May 2025].
- Kurniawati, F.N.A., 2022. *Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan solusi*. Academy of Education Journal, 13(1), pp.1–13.
- Nanggala, A., 2020. *Analisis wacana pembaharuan kebijakan zonasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2), pp.46–56.
- Rahmanti, N., 2022. *Problematisasi dan strategi Dinas Pendidikan terhadap ketidakmerataan tenaga pendidik*. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 8(2), pp.2175–2186.
- Satria, D., Kusasih, I.H. and Gusmaneli, G., 2025. *Analisis rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini: Suatu kajian literatur*. Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia, 3(2), pp.292–309. Available at: <https://doi.org/10.55606/jubpi.v3i2.3838>
- Wardhana, A., Kharisma, B. and Fauzy, M.Z., 2023. *Determinan ketimpangan pendidikan provinsi di Indonesia*. Jurnal Perspektif, 21(1), pp.101–111. Available at: <https://doi.org/10.31294/jp.v21i1>
- Wijaya, I., 2025. *Faktor ekonomi, ribuan pelajar di Lampung putus sekolah*. [online] Radio Republik Indonesia. Available at: <https://www.rri.co.id/daerah/677962/faktor-ekonomi-ribuan-pelajar-di-lampung-putus-sekolah> [Accessed 7 May 2025].